KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN 648992 (DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI/ 013.06)

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2022

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BantenKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kementerian

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
JL. KH Syam'un No. 44 D Serang, Banten
Telp (0254) 223104, 217029 Fax (0254) 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.06) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir,adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Tejo Harwanto
NIP . 196603291990031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.200.566.500,- atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.202.692.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-. Kewajiban jangka pendek berupa uang muka dari KPPN sebesar Rp 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah

sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.200.566.500,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp781.994.280,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.200.566.500,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.200.566.500,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.200.566.500,- Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (06)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22		% thd Angg	31-Dec-21
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**		**-**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	1.202.692.000	1.200.566.500	100	786.225.000
Belanja Modal	B.5		-		
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		**1.202.692.000**	**1.200.566.500**	**100**	**786.225.000**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (06)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		-
Piutang Bukan Pajak	C.4		-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		-
Belanja Dibayar di Muka	C.8		-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		-
Persediaan	C.10		-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15		-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20		-
Jumlah Aset Tetap			-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28		-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		-
JUMLAH PENDAPATAN			**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		-
Beban Persediaan	D.3		-
Beban Barang dan Jasa	D.4	866.621.700	574.859.280
Beban Pemeliharaan	D.5		
Beban Perjalanan Dinas	D.6	333.944.800	207.135.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9		-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		-
JUMLAH BEBAN		**1.200.566.500**	**781.994.280**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(1.200.566.500)**	**(781.994.280)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya			-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(1.200.566.500)**	**(781.994.280)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(1.200.566.500)**	**(781.994.280)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (06)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.200.566.500	(781.994.280)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.200.566.500	(781.994.280)
EKUITAS AKHIR	E.5	**0**	**0**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Meneteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan

bidang pemasyarakatan;

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian
3. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat memenuhi standar serta akuntabel
4. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) .

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

- **Pendapatan- LRA**
  - Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
  - Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

- **Pendapatan- LO**
  - Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

  - Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
  - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**
  - Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**
  - Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
  - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) melaksanakan kegiatan Berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA - 013.06.2.648992/2022 tanggal 23 November 2022.*

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	1.202.692.000	786.225.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	**1.202.692.000**	**786.225.000**

Realisasi Pendapatan Rp0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Dec-21		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	ealisasi Per 31 Desember 202	ealisasi Per 31 Desember 202	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	**-**	**-**	

Realisasi Belanja Negara Rp1.202.692.000

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.200.566.500,- atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp 1.202.692.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.202.692.000	1.200.566.500	100
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	**1.202.692.000**	**1.200.566.500**	100
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	**1.202.692.000**	**1.200.566.500**	99,82

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	Realisasi per 31 Desember 2022	Realisasi Per 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.200.565.500	781.994.280	53,53
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**1.200.565.500**	**781.994.280**	**53,53**

Terdapat kenaikan belanja barang dibanding Tahun 2021 sebesar 53.53% hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran.

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2022 mengalami tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2022 dan 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Belanja Vakasi			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Barang Rp 1.200.566.600,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.200.566.600,- dan Rp.781.994.280,-. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan 53% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021
Belanja Bahan	123.989.070	34.248.500
Belanja Honor Output Kegiatan	87.500.000	61.050.000
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi	67.040.000	30.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	315.894.630	290.210.000
Belanja Non Opr- Penanganan Pandemi		119.990.780
Belanja Sewa	68.200.000	27.000.000
Belanja Jasa Profesi	2.400.000	
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi	5.350.000	12.360.000
Belanja Jasa Lainnya	196.248.000	
Belanja Perjalanan Biasa	293.584.800	193.560.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.125.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.860.000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	12.450.000
Jumlah Belanja Kotor		
Pengembalian Belanja		
Jumlah Belanja	**1.200.566.500**	**781.994.280**

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh tidak adanya anggaran Belanja Modal di Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 mengalami tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 31 Desember 2021 Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2022 atau TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-21	31-Dec-20	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah			
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah			
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0, tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2022 dan 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN		31-Dec-21	NAIK (TURUN) %
alat kantor dan alat rumah tangga	0		0,00
alat studio,komunikasi dan pemancar	0		0,00
komputer	0		0,00
alat keselamatan kerja	0		0,00
			0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. tidak ada kenaikan atau penurunan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2022 dan 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Belanja modal gedung dan bang	0		
Jumlah Belanja Kotor	**0**		
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan baik di TA 2022 ataupun di TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-21	31-Dec-20	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan			
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja modal lainnya pada TA 2022 dan TA 2021.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Belanja Bantuan

Sosial pada TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	
Pengembalian	0	-	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31-Dec-21	31-Dec-20
Uang	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31-Dec-21	31-Dec-20
Uang Tunai		
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31-Dec-21	31-Dec-20
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp.0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20
Piutang PNBP		
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20
1			
2			
Jumlah			

Bagian Lancar TPA Rp0

C.6 Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20
1			
2			
Jumlah			

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah

dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Tidak terdapat belanja dibayar dimuka pada Tahun Anggaran 2022. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31-Dec-21	31-Dec-20
Pembayaran Sewa Kendaraan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp 0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31-Dec-21	31-Dec-20
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-
Persediaan Strategis untuk berjaga jaga	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Tagihan TP/TGR Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Debitur	31-Dec-21	31-Dec-20
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp0. Tidak terdapat aset tetap berupa tanah baik di 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**0**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2018	**0**

Peralatan dan Mesin

Rp0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**0**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 30 Juni 2018	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	0
Nilai Buku per 30 Juni 2018	**0**

Gedung dan Bangunan

Rp0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo Per 30 Juni 2018	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	-
Nilai Buku per 30 Juni 2018	**-**

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	**-**
nilai Buku per 30 Juni 2019	-
nilai Buku per 30 Juni 2020	**-**

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**0**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2020	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku per 30 Juni 2020	**0**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- Tidak terdapat KDP di 31 Desember 2022.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0 dan (Rp0),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin			0
2	Gedung dan Bangunan			0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			0
4	Aset Tetap Lainnya			0
	Akumulasi Penyusutan	**0**	**0**	**0**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	**-**

Aset Lain-Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2020	**-**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	**-**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software			0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain			0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	**-**	**-**

Ekuitas

Rp0

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Pendapatan PNBP Rp0

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa			#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain			#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Tidak terdapat pendapatan Negara Bukan Pajak Baik di 31 Desember 2022 maupun 31 Desember 2021.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20	
Beban Gaji			
Beban Tunjangan-tunjangan			
Beban Honorarium dan Vakasi			
Beban Lembur			
Jumlah	**0**	**0**	

Beban Persediaan Rp0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi			
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Barang dan Jasa Rp866.621.700,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp866.621.700,- dan Rp574.859.280,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-22	Pengembalian Belanja	31/12/202
Beban Barang Operasional-Penanganan Panc	67.040.000		30.000.000
Beban Bahan	123.989.070		34.248.500
Beban Honor Output Kegiatan	87.500.000		61.050.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	315.894.630		290.210.000
Beban Barang Non Opr - Penanganan Pandemi			119.990.780
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya			
Beban Jasa Pos dan Giro			
Beban Sewa	68.200.000		27.000.000
Beban Jasa Profesi	2.400.000		
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi	5.350.000		12.360.000
Beban Jasa Lainnya	196.248.000		
Jumlah	**866.621.700**	**0**	**574.859.280**

Beban Pemeliharaan Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-21	Pengembalian	31-Dec-20
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Beban Pemeliharaan Lainnya			
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Beban Perjalanan Dinas Rp333.944.800,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp333.944.800,- dan Rp207.135.000 ,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi

untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-22	Pengembalian Belanja	31/12/202
Beban Perjalanan Biasa	293.584.800	0	178.994.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	0	3.325.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.860.000	0	18.300.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	28.231.000
Jumlah	**333.944.800**	**0**	**228.850.000**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban

bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-21	31-Dec-20	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		-	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software			-
Beban Penyusutan aset lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat			
Penjualan Alat Kantor			
Selisih Kurs			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)		0	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**0**	**0**	**0,36**

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa

Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Dec-21	31-Dec-20	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP			0,00
Beban Perjalanan Dinas			0,00
Beban Persediaan			0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO (Rp1.200.566.500)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp1.200.566.500,-) dan (Rp781.994.280,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	
Suku Cadang	
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset TetapRp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp1.200.566.500,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.200.566.500,- dan Rp781.994.280. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.200.566.500
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**1.200.566.500**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp1.200.566.500,-

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kemasyarakat	Ditjen Imigrasi	
2	Peralatan dan Mesin	Ditjen Imigrasi	
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. yang merupakan transfer keluar barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat ke Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang/persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	Ditjen Imigrasi	
	Jumlah		

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang

tahun 2022. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			
2			
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Ekuitas Akhir

Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-